

NURCHOLISH MADJID: SNOUCKISME DAN PERGOLAKAN BANGSA

Oleh Soegeng Sarjadi

Diskursus mengenai letak pemikiran, kontroversi, dan aksi politik-keagamaan Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam sejarah pergolakan bangsa dan Islam Indonesia, menurut analisis saya, berakar dari dua titik tolak. *Pertama*, berkaitan dengan gairah Cak Nur untuk membunuh warisan Snouckisme. *Kedua*, berkaitan dengan konsistensi Cak Nur untuk menghidupkan keislaman sebagai milik nasional yang paling berharga dan berpengaruh. Karena itu, diskusi mengenai letak pemikiran, kontroversi, dan aksi politik-keagamaan Cak Nur sebenarnya sama artinya dengan diskusi mengenai posisi Cak Nur sebagai kognitariat (pekerja otak) yang ingin menempatkan keislaman pada tempat semestinya.

Mengapa Snouckisme?

Mengapa saya berangkat dari Snouckisme untuk “melihat” posisi Cak Nur sebagai seorang kognitariat? Bagi generasi muda—yang tentu saja tidak bersentuhan dengan Cak Nur muda—tentu asing dengan istilah Snouckisme tersebut. Padahal, kalau tidak salah ingat, Cak Nur sendirilah yang memopulerkan istilah itu di tahun 1960-an yang diambil dari nama depan pemikir Belanda, Snouck Hurgronje, yang dengan pikiran-pikiran cerdas-kejinya, berhasil menghancurkan pengaruh Islam di Indonesia, yang tentu

saja, dimulai dari Aceh.¹ Bahkan kecemerlangan Hurgronje yang didukung penuh oleh Belanda tersebut, khususnya melalui bangku pendidikan dan westernisasi, akhirnya malah menjadi “ideologi” yang melekat dalam memori elit politik Indonesia.

Dari kacamata *postmodernim*,² memori itulah yang akhirnya melawan sejarah (*memory challenges history*). Artinya elit politik tidak sekadar ingin menghapuskan keislaman yang menjadi milik nasional tetapi justru menciptakan situasi yang berkembang ke arah *Islamic phobia*. Karena yang mengembangkan *phobia* tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sumber daya politik kuat (meskipun jumlah mereka sesungguhnya kecil), tidak mengherankan jika pengaruhnya melekat bukan saja pada kelompok masyarakat yang beragama lain, tetapi juga kepada mereka yang beragama Islam. Itulah inti dari Snouckisme. Hal itu belum lagi kalau ditambah dengan Snouckisme yang berkaitan dengan budaya siklis, seperti etos kerja rendah, jam karet, budaya “*sakdadine*” (asal jadi saja) dan sebagainya. Karena begitu hebatnya pengaruh Snouckisme dalam masyarakat Indonesia sampai hari ini, makanya saya berangkat dari masalah tersebut dalam “melihat” posisi kognitariat Cak Nur.

Jadi secara kognitif, letak pemikiran Cak Nur dalam sejarah pergolakan bangsa dan Islam Indonesia adalah di dalam arena memori *Islamic-phobia* itu sendiri. Artinya, secara kognitif, Cak Nur berusaha untuk mencuci memori *phobia* yang sudah melembaga dalam masyarakat tersebut. Selain itu, dia juga memberikan pemahaman bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, memiliki keyakinan adalah mutlak. Dalam salah satu tulisannya Cak Nur berendapat:³

¹ Nurcholish Madjid, “Warisan Snouckisme,” *Mimbar Demokrasi* (Bandung: Miiggu ke IV, Juni 1968).

² Lihat, misalnya, David R. Dickens dan Andrea Fontana, *Postmodernism and Social Inquiry* (New York: Guilford Press, 1994).

³ Nurcholish Madjid, “Kembali kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Mimbar Demokrasi* (Bandung: Minggu ke I, Juli 1968), ejaan disesuaikan oleh penulis.

Kalau penulis banyak sekali kembali kepada keislaman, maka itu bukanlah dimaksudkan hanya semata-mata karena hendak mementingkan Islam saja, melainkan karena keyakinan penulis ialah bahwa kembali kepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsistensi mutlak daripada pendasaran segala permasalahan kepada Pancasila. Sudah ditegaskan, bahwa penulis bersama dengan banyak orang di Indonesia ini, berpendapat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila primer dan sumber daripada Pancasila. Sedangkan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa itu konkretisasinya ialah kembali kepada ajaran-ajaran-Nya, dalam hal ini ialah Agama Allah.

Dan lagi, keislaman merupakan milik nasional kita yang paling banyak berpengaruh. Oleh karena itu penonjolan keislaman hanyalah merupakan penonjolan milik nasional yang paling penting itu. Barangkali inilah yang disebut *ideology-oriented*. Agaknya memang demikianlah keadaannya. Dan kita akan mempertahankan kebebasan kita untuk berideologi, sebab ini adalah termasuk kebebasan menganut keyakinan, asalkan masih konsisten dengan dasar negara. Karena hidup tanpa keyakinan adalah tidak mungkin.’

Ironisnya, cara pikir Cak Nur yang selalu berpijak pada prinsip-prinsip holistik (komprehensif), seperti tampil dalam kutipan di atas, justru mengundang kontroversi. Banyak tokoh Islam kita yang justru mengecam Cak Nur dengan pertanyaan, “Bagaimana seorang pemikir Islam bisa begitu sekular? Lihat saja dia dengan mudah mau menerima Pancasila dan tidak membela Islam sebagai asas berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan dia itu kafir”.

Bagi mereka yang tidak memahami tradisi intelektual Islam yang berkembang pada abad tengah, pemikiran-pemikiran Cak Nur mungkin memang sulit dimengerti. Padahal selain buku-buku yang terbit dalam zaman industrialisasi, sumber argumentasi dan referensi Cak Nur sebenarnya berpijak kukuh pada Kitab Kuning yang klasik. Karena itu, kalau kita amati perdebatan-perdebatan pemikiran Cak Nur yang berkembang selama ini, para “lawan”

Cak Nur justru bukan para kiai yang akrab dengan Kitab Kuning. Mereka, para “penghujat” itu, umumnya adalah masyarakat Islam kota yang tidak mempunyai akses terhadap kitab klasik tersebut. Sebaliknya, para kiai—yang sering dianggap kurang modern—mereka tenang-tenang saja mendengar gagasan-gagasan Cak Nur yang sering dianggap kontroversial.

Dalam posisi sebagai kognitariat, Cak Nur tidak lepas dari pengaruh para pemikir Islam sebelumnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Buya Hamka, Ibn Taimiyah, Fazlur Rahman, dan lain-lain. Langsung atau tidak langsung, mereka itulah yang menjadi agen sosialisasi (selain keluarga, pondok pesantren Gontor, IAIN Jakarta, dan lain-lain) yang membentuk paradigma berpikir dan bersikap Cak Nur. Hasilnya, seperti yang kita tahu, proses sosialisasi tersebut telah membentuk Cak Nur menjadi suatu pribadi yang unik, yaitu kokoh memegang independensi. Dengan memahami realitas sosial Cak Nur tersebut, kita akan paham dengan konsistensi Cak Nur baik ketika berhadapan dengan Snouckisme yang berarti *Islamic-phobia* maupun Snouckisme dalam dimensi cara berpikir sempit dari masyarakat Islam.

Menghadapi dua kelompok masyarakat yang berbeda tersebut (yang satu takut terhadap keislaman dan yang lain adalah masyarakat Islam yang anti toleransi beragama), Cak Nur secara konsisten mendasarkan pendapatnya pada Cyrel Glasse, “... *the fact that one revelation should name others as authentic is an extraordinary event in the history of religions*”.⁴ Melalui kutipan ini, Cak Nur ingin mengingatkan kepada mereka yang *Islamic-phobia* bahwa ketakutan terhadap Islam adalah sangat tidak berdasar karena Islam itu sendiri mengakui keaslian ajaran-ajaran lain. Itu artinya, Islam terbukti sangat toleran. Sebaliknya, bagi orang-orang Islam yang sempit

⁴ Dikutip dari Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 69. Ulasan selengkapnya dari Cyril Glasse, lihat, *The Concise Encyclopedia of Islam* (San Francisco: Harper, 1991), s.v. “Ah1 al-Kitab.”

cara berpikirnya, Cak Nur mencoba membuka cakrawala berpikir mereka agar lebih komprehensif sehingga mampu menjadi pupuk bagi suburnya sikap toleransi.

Tentang Aksi Politik

Jika posisi kognitariat Cak Nur dalam tataran kognitif bebas dari batasan ruang dan waktu, lain halnya dengan posisi kognitariat dalam arena politik. Tetapi barangkali sudah *innate* (sifat bawaan) dari Cak Nur, bahwa dia akan selalu menimbulkan kontroversi. Sama dengan apa yang terjadi pada tingkat pemikiran, aksi-aksi politik yang dilakukannya pada ruang dan waktu tertentu, utamanya ketika kebuntuan politik sedang terjadi, ternyata juga mengundang perdebatan di dalam masyarakat.

Banyak aksi politik yang telah dilakukan Cak Nur selama ini—yang kalau kita amati seksama—sebenarnya merupakan bagian integral dari upaya Cak Nur untuk menghidupkan keislaman sebagai milik nasional yang berharga dan berpengaruh. Lihat saja ketika Cak Nur, dalam komentar-komentarnya di media massa, secara konsisten menyarankan Megawati untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah juga anak dari seorang muslimah (Fatmawati), dan bukan sekadar citra Bung Karno yang tampil. Secara konsisten pula, Cak Nur menyarankan agar PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu segera mengambil inisiatif. Aksi politik Cak Nur yang demikian, tentu saja, membuat banyak orang gerah terutama yang tidak setuju dengan presiden perempuan. Padahal Cak Nur barangkali ingin mengajarkan bahwa karena aturan main demokrasi sudah disepakati secara nasional, maka ketaatan terhadap asas tersebut merupakan bagian integral dari praktek keislaman yang harus dipegang.

Banyak aksi politik yang telah dilakukan Cak Nur di simpul-simpul pergolakan bangsa selama ini. Tetapi, tidak mudah untuk mengingat semuanya. Yang jelas, aksi politik pertama Cak Nur,

bersama-sama dengan angkatan '66 yang lain, adalah menggulingkan kekuasaan Orde Lama. Sejarah waktu itu memang menuntut demikian. Sehingga terbentuknya Orde Baru, memang merupakan suatu harapan baru untuk tumbuhnya demokrasi. Tetapi, barangkali benar apa yang disebut dalam teori demokrasi bahwa militer itu tidak “kompatibel” dengan demokrasi. Terbukti, kekuasaan Orde Baru semakin menyimpang sehingga terbukti kembali kebenaran tesis Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”. Angkatan '66, termasuk saya dan Cak Nur, telah memberikan *blank-cheque* kepada Pak Harto sehingga kekuasaannya menjadi tidak terbatas.

Tetapi, harus jujur diakui, bahwa roda pemerintahan Orde Baru pada dekade awal kekuasaannya memang berjalan baik. Pada masa-masa itu, untuk menghidupkan keislaman, Cak Nur beberapa kali membuat aksi politik. Tujuannya jelas, agar keislaman yang menjadi milik nasional tidak menjurus pada sikap mau menang sendiri, antitoleransi dan menjadi diktator mayoritas. Aksi politik Cak Nur yang paling populer di tahun 1970-an ialah ketika ia menentang politisasi Islam dan berteriak sedemikian lantang: *Islam Yes, Politik Islam, No!* Siapa yang berani berteriak sedemikian lantang ketika itu? Siapa yang berani mengambil resiko dihujat dan dicaci maki oleh banyak tokoh-tokoh Islam kota ketika itu?

Sikap konsisten Cak Nur yang ingin menampilkan keislaman sebagai milik nasional yang paling berharga dan berpengaruh, dengan wajah keislaman yang santun, secara hipotesis tidak bisa dilepaskan dari pemahaman Cak Nur mengenai keteringgalan masyarakat Islam Indonesia selama ini. Akar persoalan dari keteringgalan masyarakat tersebut, kalau diruntut, tak lepas dari sikap tegas para tokoh-tokoh Islam generasi tua dalam menentang penjajah. Dalam rangka menyusun kekuatan, mereka mengambil sikap mundur ke pedesaan dengan mendirikan pesantren-pesantren sebagai basis perjuangan.

Ironisnya, ketika zaman berubah dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia didasarkan pada ukuran-ukuran pendidikan

formal, maka sulit bagi para “lulusan” pesantren untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahap-tahap awal pembangunan nasional, masyarakat Islam selalu tertinggal. Padahal potensi keislaman, secara objektif adalah luar biasa khususnya kalau dikaitkan dengan kemampuannya untuk membentuk kemandirian dan harga diri bangsa. Hal ini belum lagi ditambah dengan beberapa pemberontakan seperti DI/TII, Kahar Muzakkar, Sultan Hamid dan lain-lain, yang meskipun memang patut disesalkan, tetapi sebenarnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari persoalan ketidakadilan sosial yang terjadi ketika itu.⁵

Keinginan Cak Nur untuk menjadikan keislaman sebagai milik bangsa yang paling berpengaruh kembali menunjukkan kinerjanya ketika kebobrokan menggerogoti pemerintah Orde Baru. Krisis ekonomi yang diikuti oleh pergolakan bangsa telah mendorong tokoh-tokoh reformis baik mahasiswa, aktivis, maupun tokoh-tokoh tua untuk keluar dari sarangnya. Aksi politik Cak Nur dalam menggalang kekuatan, mempengaruhi kognisi kelompok-kelompok strategis, dan akhirnya mengajukan semacam “memorandum” agar Pak Harto mengundurkan diri, menunjukkan konsistensi sikapnya sebagai kognitariat. Bersama-sama dengan kekuatan reformis bangsa yang lain, utamanya para aktivis dan mahasiswa, Cak Nur telah mencabut kembali *blank-cheque* yang dulu pernah diterima Pak Harto dari angkatan ‘66.

Setelah Soeharto jatuh, dengan tegas Cak Nur selalu mengingatkan Habibie, bahwa pemerintahannya hanya bersifat transisi. Ketika Habibie terkesan mengabaikan peringatan-peringatan itu, Cak Nur dengan gamblang memberikan penilaian, “*Habibie itu rumongso bisa, tapi ora bisa rumongso*”. Dengan demikian, bagi Cak Nur aksi politik untuk menghidupkan keislaman bukan berarti harus membela mati-matian seseorang hanya karena dia beragama

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 257.

Islam, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menebarkan *salâmah* (keselamatan), *hasanah* (kebahagiaan), dan meletakkan kepercayaan pada mereka yang *amânah* (kualitas dapat dipercaya, mempunyai kredibilitas).

Catatan Penutup

Tidak sedikit orang menilai bahwa pemikiran dan aksi politik yang dilakukan Cak Nur, yang memang sering kontroversial, disebabkan karena adanya interes dan target politik pribadi. Karena tuduhan-tuduhan tersebut sejauh ini tidak terbukti, apalagi Cak Nur tidak pernah menunjukkan minatnya pada kekuasaan, maka orang pun menjadi bingung. Padahal, bagi saya pribadi, apa yang dilakukan Cak Nur selama ini, tak lebih dari keinginan dia untuk beribadah (dengan harapan semoga tercatat sebagai amal saleh). Kalau dia memilih untuk membunuh warisan Snouckisme dan menghidupkan kembali keislaman sebagai inti medan ibadah, itu hanya sekadar pilihan. Yang jelas, dia telah menunjukkan konsistensinya sebagai seorang kognitariat baik dilihat dari sudut pemikiran maupun aksi politiknya. ❖